

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2024 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan Anggaran Tahun 2024.

LAKIN Tahun 2024 disusun berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor : ND-465/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2024 yang Disajikan dalam bentuk LAKIN sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi Pemerintah diwajibkan Untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya ini, diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan gambaran yang jelas, transparan serta akuntabilitas bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya demi tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

Bandung, 15 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
Eko Radnadi Susetio



II. Sistematika pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Perencanaan kinerja
Bab III	Akuntabilitas kinerja
Bab IV	Penutup

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor : NOMOR ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2024 yang disajikan dalam bentuk LAKIN sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berkedudukan di Jalan Peta No.7 Bandung dan menerapkan sistem administrasi modern dimulai Tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007.

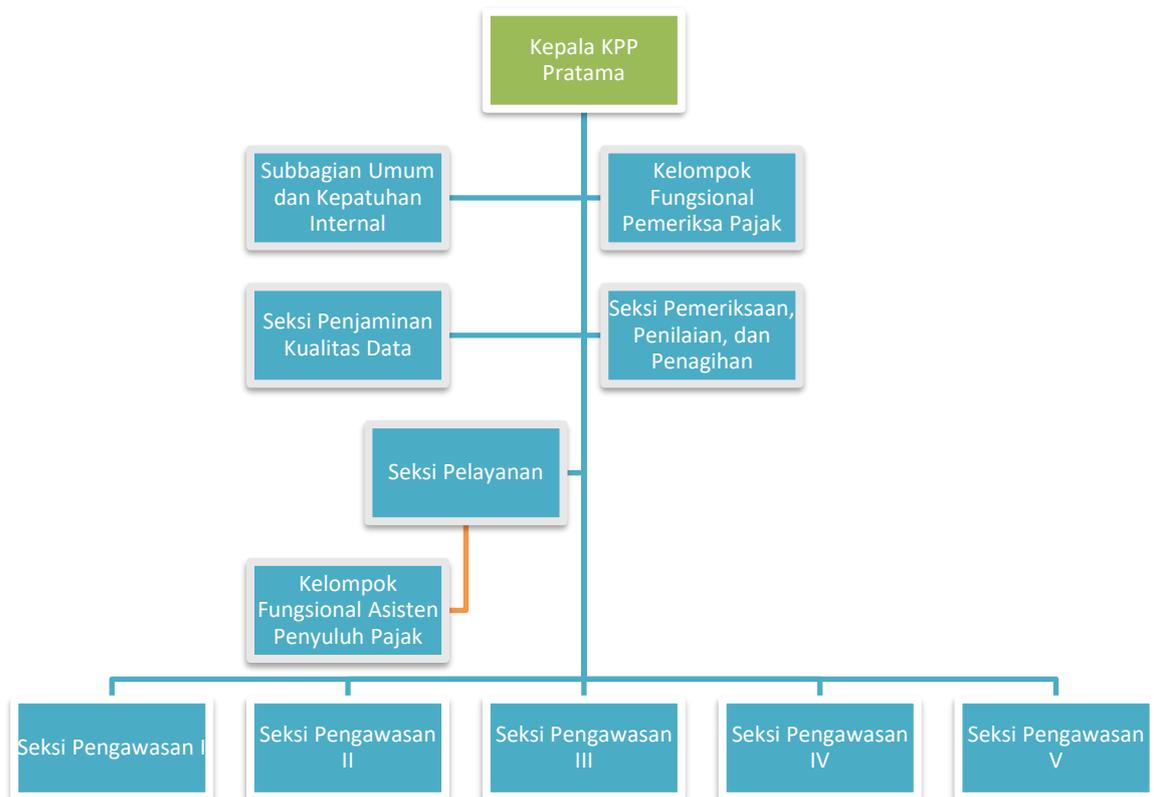
Secara umum, KPP Pratama Majalaya mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target Penerimaan yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk Tahun 2024, yaitu sebesar 672.526.905.000,00

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Majalaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- c. Penyuluhan perpajakan;
- d. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- e. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- f. Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan intensifikasi;
- k. Pelaksanaan administrasi kantor.

Sedangkan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mempunyai struktur organisasi terdiri dari :



- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. GAMBARAN UMUM

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ;

Sumber daya manusia (SDM) merupakan asset yang paling berharga dalam sebuah institusi atau instansi. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan didukung dengan penerapan kode etik yang secara jelas menyebutkan hal-hal yang wajib dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran kode etik tersebut. Ketersediaan SDM dalam segi

jumlah dan tingkat pendidikan serta kompetensi yang memadai sangatlah menunjang bagi tercapainya tujuan instansi dan mewujudkan visi misi organisasi. Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, setiap SDM di KPP Pratama Majalaya harus senantiasa dilandasi dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang terdiri dari : Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Adapun jumlah pegawai dilingkungan KPP Pratama Majalaya sebanyak 91 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Seksi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	-	1	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5	3	1	9
3	Seksi Pelayanan	7	7	1	15
4	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	2	4	1	7
5	Seksi Penjaminan Kualitas Data	1	4	-	5
6	Seksi Pengawasan I	1	6	1	8
7	Seksi Pengawasan II	-	5	1	6
8	Seksi Pengawasan III	1	7	-	8
9	Seksi Pengawasan IV	-	6	-	6
10	Seksi Pengawasan V	2	4	-	6
11	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak	3	1	2	6
12	Kelompok Asisten Penyuluh Pajak	2	4	-	6
Jumlah		25	51	9	85

1. Berdasarkan kedudukan/jabatan, jumlah 85 pegawai organik ini terinci sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor 1 Orang
- b. Pejabat Eselon IV 9 Orang
- c. Pejabat Fungsional 12 Orang
- d. Account Representative 28 Orang
- e. Pelaksana 31 Orang

2. Wilayah Kerja dan Jumlah Wajib Pajak

Wilayah kerja KPP Pratama Majalaya meliputi Wilayah Kab. Bandung yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, yaitu :

No	Kecamatan	Desa
1	Cileunyi	Cileunyi Kulon
		Cileunyi Wetan
		Cimekar
		Cinunuk
		Cibiru Hilir
		Cibiru Wetan
2	Cimencyan	Pada Suka
		Cibeunying
		Cimencyan
		Mandalamekar
		Cikadut
		Ciburial
		Sindanglaya
		Mekarsaluyu
		Mekarmanik
3	Cilengkrang	Jatiendah
		Cilengkrang
		Cipanjalu
		Melatiwangi
		Ciporeat
		Girimekar
4	Bojongsoang	Lengkong
		Bojongsoang
		Buahbatu
		Cipagalo
		Bojongsari
		Tegalluar
5	Cicalengka	Cicalengka Kulon
		Cicalengka Wetan
		Babakan Peuteuy
		Cikuya
		Dampit
		Margaasih
		Narawita
		Panenjoan
		Tanjungwangi
		Tenjolaya
		Waluya
Nagrog		

6	Nagreg	Nagreg
		Bojong
		Ciaro
		Ciherang
		Citaman
		Mandalawangi
7	Cikancung	Mandalasari
		Cikacung
		Cikasungka
		Cihanyir
		Ciluluk
		Hegarmanah
		Mekaraksana
		Tanjunglaya
		Srirahayu
8	Rancaekek	Rancaekek Wetan
		Rancaekek Kulon
		Bojongsalam
		Bojongloa
		Jelegong
		Linggar
		Cangkuang
		Haurpuguh
		Sukamanah
		Sukamulya
		Tegalsumedang
		Sanglang
		Nanjungmekar
9	Ciparay	Ciparay
		Gunungleutik
		Mekarsari
		Cikoneng
		Ciheulang
		Pakutandang
		Sumbersari
		Mangunharja
		Sagaracipta
		Sarimahi
		Serangmekar
Babakan		
10	Pacet	Cipeujeuh
		Cikitu
		Cinanggela
		Maruyung

		Sukarame
		Nagrak
		Cikawo
		Mekarjaya
		Pangauban
		Mandalahaji
		Girimulya
		Tanjungwangi
		Mekarsari
11	Kertasari	Sukapura
		Cibeureum
		Santosa
		Tarumajaya
		Neglawangi
		Cihawuk
		Cikembang
12	Majalaya	Majalaya
		Wangisagara
		Biru
		Padamulya
		Bojong
		Majasetra
		Majakerta
		Sukamaju
		Padaulun
		Neglasari
		Sukamukti
13	Solokanjeruk	Rancakasumba
		Solokanjeruk
		Cibodas
		Panyadap
		Bojongemas
		Padamukti
		Langensari
14	Paseh	Cigentur
		Cipedes
		Loa
		Cijagra
		Cipaku
		Sindangsari
		Drawati
		Sukamanah
		Sukamantri
		Karangtunggal

		Mekarpawitan
		Tangsimekar
15	Ibun	Ibun
		Laksana
		Dukuh
		Talun
		Pangguh
		Lampegan
		Mekarwangi
		Sudi
		Tangulun
		Cibeet
		Karyalaksana

Pengawasan dan pembinaan Wajib Pajak Tahun 2024 dibagi menjadi dua yaitu, Wajib Pajak strategis yang diampu Seksi Pengawasan I dan Wajib Pajak kewilayahan yang terdiri dari 15 (lima belas) wilayah kecamatan yang diampu oleh 4 (empat) Seksi Pengawasan, sebagai berikut :

No.	Seksi Pengawasan	Wilayah kerja kelurahan
1.	Pengawasan II	Bojongsoang
		Ciparay
		Pacet
		Kertasari
2.	Pengawasan III	Rancaekek
		Cicalengka
		Nagreg
		Cikancung
3.	Pengawasan IV	Cimenyan
		Cilengkrang
		Cileunyi
		Paseh
4	Pengawasan V	Majalaya
		Solokanjeruk
		Ibun

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jendral Pajak tahun 2020 - 2024, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dalam menyusun visi, misi, dan reestranya mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi Direktorat Jendral Pajak. Penyusunan IKU/IKI di KPP Pratama Majalaya disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan visi dan penjelasannya

Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang rencana strategis Direktorat Jendral Pajak tahun 2020-2024 Visi DJP adalah “Menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan.”

Berdasarkan visi yang telah dibuat oleh DJP maka KPP Pratama Majalaya memiliki visi sebagai berikut:

- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edkasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil;
- Melaksanakan program budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional dan bermotivasi.

Seperti halnya Visi Direktorat Jendral Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan direktorat jendral pajak yang sungguh sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan

oleh segenap jajaran Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

Dalam pernyataan visi tersebut ditegaskan, bahwa: DJP ingin menjadi suatu institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat. Efektif dan efisien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem yaitu DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem dimana dibutuhkan peran sumber daya manusia diangkat melalui integritas, profesionalisme, sehingga sistem administrasi perpajakan dilaksanakan oleh sumber daya manusia DJP yang berintegritas dan memiliki profesionalisme tinggi.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Untuk mencapai Visi tersebut, Direktorat Jendral Pajak memiliki misi yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
2. Melaksanakan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut diukur dan di pertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

3. Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJP, berpedoman pada nilai nilai sebagai berikut :

- Integritas – berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip prinsip moral.
- Profesionalisme – bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.
- Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- Pelayanan – memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

- Kesempurnaan – senantiasa melakukan upaya perbaikan segala bidang untuk menjadi dan memeberikan yang terbaik.

4. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan visi misi DJP yang telah diselaraskan dengan tujuan Kementerian Keuangan maka:

Tujuan 1: Penerimaan Negara yang Optimal

Tujuan 2: Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien

5. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara teratur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya mempunyai sasaran yaitu tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024.

1) Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, ditetapkan 6 (enam) kebijakan yaitu:

- 1) Penerimaan pajak yang optimal
- 2) Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar
- 3) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak
- 4) Peningkatan Ekstensifikasi WP OP/Badan
- 5) Tercapainya pencairan tunggakan pajak yang optimal
- 6) Terpenuhinya standar prestasi pemeriksaan

2) Program

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) program yang terdiri dari:

- 1) Pengawasan pembayaran masa dan penggalan potensi pajak
- 2) Melaksanakan layanan unggulan
- 3) Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dalam rangka ekstensifikasi
- 4) Pelaksanaan penagihan pajak
- 5) Melakukan penyuluhan secara daring dalam rangka meningkatkan kepatuhan formal dan material

B. PENETAPAN KINERJA

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan.

Target tahun 2024 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
Learning & Growth Perspective		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Realisasi
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,03%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	92,76
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	99,97%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	105,53%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,49%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%

4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	110,85%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	118,03%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,68%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	116,05%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	108,77%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	110,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,38%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	113,58%

9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	103,49%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,03%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tuisi DJP antara lain:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam setiap sasaran strategis di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada realisasi IKU 1a-CP (Persentase realisasi penerimaan pajak) sebesar 100,03% dan realisasi IKU 1b-CP berwarna kuning (Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas) sebesar 92,76%, sehingga indeks capaian Stakeholder Perspective berwarna kuning adalah 96,96% dengan bobot tertimbang sebesar 30%..

2. *Customer Perspective*

Untuk indeks capaian poin kedua indeks capaiannya 101,40% dari bobot tertimbang 20%, dengan realisasi IKU 2a-CP (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berwarna kuning sebesar 99,97%, realisasi IKU 2b-CP (Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi) sebesar 105.53% kemudian realisasi IKU 3a-CP (Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)) sebesar 100,49%..

3. *Internal Process Perspective*

Untuk indeks capaian poin ketiga indeks capaiannya 115,54% dari bobot tertimbang 25%. Dengan realisasi IKU 4a-CP (Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan) sebesar 120%, realisasi IKU 4b-N (Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan) sebesar 110,85%, realisasi IKU 5a-CP (Persentase pengawasan pembayaran masa) sebesar 120%, realisasi IKU 6a-CP (Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan) sebesar 118,03%, realisasi IKU 6b-N (Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan) sebesar 119,68%, realisasi IKU 6c-N (Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu) sebesar 116,05%, realisasi IKU 7a-CP (Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian) sebesar 120%, realisasi IKU 7b-CP (Tingkat efektivitas penagihan) sebesar 108,77%, realisasi IKU 7c-N (Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan) sebesar 100%, realisasi IKU 8a-CP (Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan) sebesar 110%, dan realisasi IKU 8b-CP (Persentase penghimpunan data regional dari ILAP) sebesar 120%.

4. *Learning & Growth Perspective*

Untuk indeks capaian poin keempat indeks capaiannya 115,74% dari bobot tertimbang 25% dengan realisasi IKU 9a-N (Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM) sebesar 117,38%, realisasi IKU 9b-N (Indeks Penilaian Integritas Unit) sebesar 113,58%, realisasi IKU 9c-N (Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko) sebesar 103,49%, realisasi IKU 10a-CP (Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran) sebesar 120%.

Penggunaan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Majalaya telah dilaksanakan secara efektif dengan menempatkan pegawai sesuai dengan komposisi pegawai yang berjumlah 85 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda (umur, pendidikan, pangkat dan golongan). KPP Pratama Majalaya menempatkan para pegawai sesuai dengan kemampuan, kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing pegawai tersebut.

Rencana aksi ke depan KPP Pratama Majalaya adalah sebagai berikut

1. Penggalian potensi perpajakan berdasarkan peta potensi perpajakan;
2. Penggalian potensi di bidang Industri Pengolahan;
3. Pembuatan dan pemanfaatan bank data yang bersumber dari intern dan ekstern;
4. Penggalian potensi bersama atas WP yang mempunyai hubungan istimewa/WP group;
5. IHT tentang Analisa Laporan Keuangan dan *Transfer Pricing*;
6. Bedah Wajib Pajak;
7. Gelar Perkara untuk SKP dengan nominal besar;
8. Pengawasan terhadap permohonan SKB PPN Barang Impor;
9. Menghimbau WP untuk melakukan pembetulan SPT LB yang tidak mencontreng kolom Restitusi/Kompensasi;
10. Pemanfaatan dan pencarian laporan keuangan WP yang telah diaudit;
11. Meningkatkan komunikasi dengan WP melalui SMS *Broadcast* dan *Whatsapp*;
12. Percepatan penggalian potensi dengan Botsol, *Web Scraper*;
13. Optimalisasi penilaian tanah dan bangunan (penjualan tanah dan Kegiatan Membangun Sendiri) dengan cara menambah petugas penilai melalui diklat;
14. *Tax Gathering* untuk meningkatkan Wajib Pajak yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak patuh menjadi patuh, dan yang patuh diawasi kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakannya.

B. Realisasi Anggaran

Nama IKU	Capaian	
	Nasional	KPP Pratama Majalaya
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120%	120%

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Prata ma Majalaya memperoleh dana pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-15 sebesar Rp 5,012,074,000 sedangkan realisasi dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA-15 sebesar Rp 4,922,979,518 sedangkan realisasi pemanfaatan dana untuk DIPA BA-15, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Belanja Pegawai	Rp 654,433,000
2.	Belanja Barang	Rp 4,268,546,518
3.	Belanja Modal	Rp 0
4.	Belanja Lain-lain	Rp 0

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang *controlable* maupun sisi eksternal yang *uncontrolable* dapat dijadikan *feedback* bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya ini, diharapkan dapat memberikan informasi lengkap dan gambaran yang jelas, transparan serta akuntabilitas bagi semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dapat memberikan motivasi dan mengubah budaya kerja bagi aparat di jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya demi tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak secara khusus dan Visi Misi Kementerian Keuangan secara umum.